



Halaman : 2

BAGIKAN BUKU KE INSTANSI

Implaw-Pemkot Sosialisasi HAM

YOGYA (KR) - *Indonesian Monitoring Procedure of Law (Implaw)* Yogyakarta dan Forum Pemerhati Kebijakan Kota bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta melakukan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sosialisasi diwujudkan dalam bentuk penggantian dan pembagian buku berisikan Undang-undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang RI No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Undang-undang RI No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Direktur Implaw Yogyakarta Ir Chaniago Iseda SH kepada KR, Selasa (6/1) menjelaskan buku berisi 3 materi pokok perundang-undangan itu diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip HAM dan pemahaman praktis tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban. Tujuannya supaya penegakan hukum dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan dan kebenaran. "Buku ini juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dalam upaya memberantas tindak pidana pengeksploitasian perdagangan orang (human trafficking)," jelasnya. Selain kedua hal itu, menurut Chaniago Iseda keberadaan buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat umum sekaligus melahirkan rasa kritis berkaitan dengan perlindungan konsumen sesuai amanat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pendistribusian buku meliputi 14 kecamatan dan 45 kelurahan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Selain di Instansi Pemerintah Kota, buku juga didistribusikan ke lembaga kepolisian (Poltabes dan Polsektabes se-jajaran Poltabes), Lembaga Pendidikan mulai dari SMP hingga PT, Lembaga dan Organisasi Masa, serta komunitas dan paguyuban warga. "Untuk tahap awal, Implaw membagikan 4.000 eksemplar buku secara gratis," jelas Chaniago Iseda.

Terkait dengan program tersebut, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan Pemkot Yogyakarta menyambut baik penerbitan buku yang berisi tentang 3 materi pokok perundang-undangan itu. Hal tersebut disampaikan Herry Zudianto sebagaimana tertulis dalam pengantar buku tersebut. Disampaikan, diterbitkannya buku itu diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan konsumen, pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia, serta perlindungan saksi dan korban.

Penerbitan buku tersebut diharapkan mampu memberi sumbangsih bagi upaya penegakan hukum dan HAM dalam rangka membangun dan membentuk pemerintahan yang manusiawi, demokratis dan beradab. (Hrd)-f

Walikota
Wakil W
Sekretaris
Asisten ..

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005